Analisis Sistem Pembayaran Pada E-commerce Lazada Menurut Fiqih Muamalah Berdasarkan Akad Qardh dan Akad Ijarah

Khosyi' Aturrsyda^{1*}, Abdul Haris Romdhoni²⁾, Agus Marimin³⁾
^{1,2,3} Fakultas Ekonomi Bisnis, Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia
*Email correspondence: arrusyda2816@gmail.com

Abstract

This research is the result of field research to answer questions from the formulation of the problem how Paylater Practices in E-Commerce Lazada and what is the Law According to Fiqh Muamalah. This study uses a qualitative method with two data sources, namely primary data in the form of interview data on the object under study and secondary data in the form of fiqh books, books, the internet, official documents and other news sources related to this research. Research data is collected through interviews and documentation. After the data is collected, the data is processed by organizing and analyzing techniques. Furthermore, the data was analyzed using descriptive analysis techniques with a deductive mindset that takes general statements and then draws specific conclusions. The results of the study concluded that the paylater practice in Lazada e-commerce is not in accordance with the fiqh muamalah provisions because it does not meet the requirements and pillars of a Qard or Ijarah contract. The existence of interest and fines for late billing in paylater practices in Lazada e-commerce is what makes this practice fall into the category of usury. Meanwhile, usury is forbidden in Islam.

Keywords: Paylater, Lazada Paylater, Lazada Application, Qardh, Ijarah.

Citation suggestions: Aturrsyda, K., Romdhoni, A. H., & Marimin, A. (2023). Analisis Sistem Pembayaran Pada E-commerce Lazada Menurut Fiqih Muamalah Berdasarkan Akad Qardh dan Akad Ijarah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam dan General*, 2(02), 242-245. doi: -

DOI: -

1. PENDAHULUAN

Tren pengguna e-commerce di Indonesia berkembang cukup besar dalam beberapa tahun terakhir. Prediksinya, pertumbuhan masih akan terus terjadi dalam beberapa tahun ke depan. Statista mencatat jumlah pengguna e-commerce di Indonesia pada 2017 mencapai 139 juta pengguna, kemudian naik terus tiap tahunnya dan diproyeksikan tahun ini mencapai 212,2 juta (Safira, 2021).

Perdagangan elektronik atau e-commerce adalah model bisnis yang memungkinkan perusahaan atau individu bisa membeli atau menjual barang melalui internet (online). Hampir semua produk, termasuk jasa, tersedia di internet dari mulai makanan, music, buku, produk rumah tangga, tiket pesawat, investasi bisa dibeli lewat e-commerce. Bukan hanya itu, proses yang ada di e-commerce juga menyediakan terkait dengan pemesanan suatu barang secara langsung dan tersedianya tagihan yang harus dibayarkan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan (jual beli kredit online).

Transaksi kredit merupakan kegiatan yang sudah mengakar di masyarakat. Apalagi sekarang dengan perkembangan e-commerce banyak dari aplikasi marketplace yang menyediakan fitur Paylater (kredit online) untuk menarik daya beli konsumen, seperti Lazada, Tokopedia, Akulaku, Shopee. Dengan adanya fitur layanan tersebut sangat menarik minat publik, karena cara pendaftarannya sangat mudah tanpa memerlukan jaminan khusus.

Situs agregator belanja online e-commerce, pada kuartal I tahun 2022, yang berhasil memimpin pasar E-commerce Asia Tenggara adalah Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Lazada yang merupakan salah satu aplikasi jual beli online ini tak ketinggalan menawarkan metode pembayaran paylater yang dinamakan LazPaylater.

Melalui metode pembayaran LazPaylater, para pengguna Lazada akan mendapatkan kemudahan berbelanja dalam bentuk pinjaman, sehingga bisa membeli barang terlebih dahulu dengan pembayaran mendatang.

Penggunaan Paylater hanya dapat digunakan oleh pelanggan bisnis online saja dengan ketentuan syarat yang diberlakukan oleh pihak fintech. Secara bahasa, Paylater bermakna bayar tunda atau bayar nanti yang artinya konsumen dapat memesan dan mendapatkan pesanan sebelum membayar, karena Paylater merupakan fasilitas keuangan yang memakai dana dari perusahaan aplikasi, kemudian pengguna diharuskan membayar tagihannya ke perusahaan aplikasi. Pengguna diberikan kesempatan untuk menggunakan atau memanfaatkan layanan jasa fitur Paylater dan diharuskan membayar di akhir sesuai batas waktu yang ditetapkan. Misalnya, pengguna yang ingin membeli barang atau melakukan perjalanan, tetapi tidak memiliki uang tunai dapat menggunakan fitur ini, sehingga transaksinya bisa dilakukan secara online.

Untuk mendaftar Lazada Paylater, pengguna harus melakukan beberapa tahap sesuai arahan dari aplikasi seperti foto KTP, foto selfie, foto selfie bersama KTP. Selain itu, yang dapat mendaftar Lazada Paylater harus sudah pernah melakukan transaksi di Lazada. Jika pengajuan pendaftaran disetujui oleh Lazada, maka pengguna akan mendapatkan limit kredit hingga Rp.5.000.000,00. Sementara jika pengajuan Anda ditolak, kemungkinan data yang diberikan tidak valid dan tidak lengkap atau kemungkinan lain adalah tidak memenuhi syarat dan ketentuan untuk mengajukan kredit Lazada Paylater. Bunga Lazada Paylater yang ditawarkan kepada nasabah sebesar 2,95% per bulan dengan mengikuti kebijakan dari asosiasi fintech pendanaan bersama Indonesia atau AFPI.

Jual beli dengan sistem kredit seperti yang dijelaskan di atas disebut dengan jual beli bayar tunda yang identik dengan cara mengangsur pembayaran harga barang dalam jangka waktu tertentu serta nominal tertentu. Dalam fiqih muamalah, jual beli ini dikenal juga dengan istilah *alba'i bit-taqsith*. Para Ulama Fiqih berbeda pendapat dalam hal jual beli kredit. Dalam transaksi tersebut, dikhawatirkan adanya riba karena dengan sistem penundaan pembayaran yang identik dengan harga dinaikkan. Pembayaran tunda di dalamnya pun terdapat hutang.

Kegiatan jual beli semacam itu memang sudah berkembang seiring dengan munculnya ide-ide kreatif kemajuan zaman. Adanya perkembangan tersebut mempengaruhi hampir seluruh bagian dalam jual beli, mulai dari barang yang diperjualbelikan, harga, sistem pembayaran, model jual beli yang dipilih, serta mekanismenya. Sedangkan mekanisme dan persoalan cara pembayaran merupakan bagian penting dalam perspektif hukum Islam.

Dari perkembangan zaman yang ada, model-model bisnis modern tidak hanya menggunakan satu akad saja, namun cenderung menggabungkan beberapa akad yang saling mendukung antara satu dengan yang lainnya.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan dua sumber data yaitu data primer yang berupa data hasil wawancara pada obyek yang diteliti dan data sekunder yang berupa kitab fiqh, buku, internet, dokumen resmi dan sumber berita lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Setelah data dikumpulkan, data diolah dengan teknik organizing dan analyzing. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif yang mengambil pernyataan yang bersifat umum lalu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kedudukan Hukum Lazada Paylater Berdasarkan Akad Qadh

Pengertian qardh memiliki pengertian yang sama dengan perjanjian pinjam-meminjam pada Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan, "Pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama"

Dalam pembahasan fiqh, Qardh didefinisikan sebagai suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan sesuai yang diterima dari pihak pertama Djuwaini (2015: 255). Definisi tersebut juga dipaparkan oleh Muslich dalam bukunya, yaitu Fiqih Muamalah (2017: 274). Dari beberapa pendapat yang telah disebutkan diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan definisi *qardh* adalah transaksi antara

kedua belah pihak yang salah satu pihak berperan sebagai pemberi hutang (*muqrid*) berupa harta kepada pihak satunya yaitu penerima hutang (*muqtarid*), yang pada waktu tertentu harta tersebut dikembalikan sejumlah dengan harta yang dipinjam oleh *muqtarid*.

Lazada Paylater yang merupakan salah satu jenis transaksi yang mengadopsi akad utang-piutang. Pihak yang bertransaksi diharuskan sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), yang artinya pengguna pasti sudah berusia minimal 17 tahun, sehingga sudah baligh dan tentunya cakap untuk melakukan perjanjian. *Shigat* akadnya dilakukan di awal ketika pengguna hendak mengaktifkan fitur Lazada paylater. Untuk objek akadnya pun mudah ditemui, dimana pada transaksi ini objek akadnya adalah harta berupa uang. Akan tetapi pada syarat bahwa harta harus dikembalikan sejumlah dengan yang dipinjam oleh *muqtarid*, belum terpenuhi, karena terdapat bunga pada paylater ini. Pembayaran tagihan *LazPaylater* ini dapat dilakukan menggunakan cara cicilan dengan tenor dimulai dari 1-12 bulan. Pada setiap bulannya pihak Lazada mengenakan bunga sebesar 2.95% per bulannya dari total pembelanjaan. Total nominal yang harus dibayarkan akan muncul secara otomatis ketika si pengguna akan melakukan pembayaran pembelanjaan yang telah dilakukan dan besarnya biaya cicilan perbulannya akan dapat terlihat di bawah total tagihan yang harus dibayar tersebut.

Selain adanya bunga per bulannya dari pinjaman pokok tersebut, Lazada *Paylater* juga terdapat biaya tambahan lainnya yang dirasa dapat memberatkan para penggunanya, yaitu biaya tambahan keterlambatan atau yang biasa disebut denda keterlambatan sebesar 0,3% dari total tagihan yang harus dilunasi. Jika para pengguna mengalami keterlambatan untuk melunasi tagihan, maka pengguna tidak dapat menggunakan metode Lazada *Paylater* dalam pembayaran pembelanjaan yang dilakukan pada Lazada sebelum mereka melunasi tagihan sebelumnya.

Ketentuan yang ada pada Lazada paylater tersebut tidak memenuhi syarat qardh bahwa pengembalian pinjaman sesuai dengan pokok dasar pinjaman, sebab pada transaksinya terdapat biaya tambahan saat pelunasan. Berdasarkan kaidah fikih pun dijelaskan bahwa utang-piutang yang mendatangkan manfaat atau tambahan bagi pihak yang memberikan pinjaman, maka hal tersebut masuk dalam kategori riba (Al-Atsqalani 1999: 264). Sedangkan riba itu haram (Al-Baqarah, 2: 123). Dalam Lazada *Paylater* sendiri semua biaya-biaya tambahan yang ada pada setiap transaksi mendatangkan keuntungan bagi pihak Lazada tersebut. Oleh karena itu, praktik transaksi dengan metode pembayaran Lazada paylater tidak sah jika ditinjau dari akad qardh.

3.2. Kedudukan Hukum Lazada Paylater Berdasarkan Akad Ijarah

Dalam kitab Fath Al Qarib Al-Mujib, dijelaskan bahwa pengertian ijarah menurut syara' adalah suatu bentuk akad atas kemanfaatan yang maklum (diketahui), yang dikehendaki/ dituju (dari kemanfaatan suatu barang), menerima/ sah untuk diserahkan, dan kemanfaatan tersebut dibolehkan oleh syara', dan dengan adanya ganti/ imbalan yang maklum/ jelas (AL-Ghazi, 2017: 63). Dalam penerapan akad ijarah terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan sah menurut syariat Islam. Menurut Jumhur Ulama, terdapat empat rukun dan syarat, yaitu: a) kedua belah pihak yang berakad (*mu'ajir* yaitu yang menyewakan dan *musta'jir* yaitu yang menyewa) harus baligh, berakal, dan *mukhtar* (tidak dipaksa); b) *ujrah* (upah) disyaratkan *mal mutaqaawwim* (harta yang dapat dimanfaatkan), *ma'lum* (diketahui kadarnya), dapat dimiliki, suci, dan dimanfaatkan; c) manfaat yang didapatkan harus diketahui (*ma'lumah*), memiliki nilai secara syara', sesuai tujuan akad (*maqsudah*), manfaatnya dapat diserahkan/ dimanfaatkan (*maqdur ala taslim*), barang dapat dimanfaatkan tanpa menghilangkan barang, dan manfaat yang diperoleh bukanlah sesuatu yang mengikat bagi seseorang (Hidayat: 2020, 61-63). Jika akad ijarah diterapkan pada Lazada paylater, maka dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Kedua belah pihak yang berakad, yaitu *mu'ajir* (yakni Lazada), dan *musta'jir* (yaitu konsumen) adalah para pihak yang baligh, berakal, dan tidak terdapat keterpaksaan. Hal ini terlihat pada salah satu syarat mengaktifkan fitur *LazPaylater* adalah harus memiliki KTP, yang maknanya ia telah baligh dan berakal. Sebelum fitur ini diaktifkan, calon pengguna juga akan diberi pemahaman konsekuensi apa saja yang didapat setelah mengaktifkan dan menggunakan fitur *LazPaylater*. Ketentuan mengenai pihak yang berakad harus baligh juga dijelaskan dalam Pasal 301 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, bahwa untuk melaksanakan proses akad *ijarah* diharuskan memiliki kecakapan melakukan perbuatan hukum. Sehingga dapat disimpulkan pada transaksi ini, rukun dan syarat para pihak harus baligh dan berakal telah terpenuhi.

- b. *Ujrah* atau upah yang dimaksud adalah biaya tambahan atau bunga. Pembayaran tambahan ini dilakukan di setiap jatuh tempo bersamaan dengan pembayaran tagihan. Upah ini harus dibayar oleh para pengguna karena telah mendapat pinjaman dana, sehingga pihak Lazada berhak mendapat imbalan atas sewa jasa pinjaman dana yang diberikannya tersebut. Adanya biaya tambahan atau bunga ini telah dijelaskan dalam ketentuan ketika akan mengaktifkan fitur *LazPaylater*, sehingga pengguna tentu sudah paham jika menggunakan fitur ini akan dikenai biaya tambahan atau bunga dari aplikasi sehingga transaksi ini tidak mengandung *gharar*. Akan tetapi, karena Lazada menetapkan biaya tambahan ini sebagai bunga, dan bukan biaya jasa aplikasi atau semisalnya, maka bunga ini dilarang syara' sebab merupakan riba.
- c. Manfaat. Objek akad yang ada pada transaksi ini adalah jasa pinjaman dana dari aplikasi *e-commerce* Lazada sebagai media yang menyalurkan pinjaman kepada pencari pinjaman. Manfaat ini telah dijelaskan ketika hendak mengaktifkan fitur *LazPaylater*, yaitu pihak pengguna tetap dapat melakukan transaksi pada *e-commerce* Lazada meskipun pengguna pada saat bertransaksi belum bisa membayar biaya transaksinya. Selain itu, pengguna juga dijelaskan keuntungan ketika mengaktifkan fitur ini, yaitu adanya diskon serta promo-promo menarik lainnya. Keberadaan fitur ini sangat memberikan manfaat bagi para pengguna yang sedang terdesak membutuhkan bantuan. Akan tetapi karena dalam pemanfaatan ini mengandung riba, menjadikan pinjaman ini bertentangan dengan syara'. Sebagaimana penjelasan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 09/DSN- MUI/IV/2000, bahwa manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan), sedangkan pada *LazPaylater* terdapat unsur keharaman berupa bunga pinjaman yang merupakan riba nasi'ah.

Dari uraian penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa transaksi ini masih belum memenuhi syarat dan rukun akad *ijarah*.

4. KESIMPULAN

Metode pembayaran *paylater* pada *e-commerce* Lazada bisa digunakan apabila pengguna telah mendaftar dan disetujui oleh pihak Lazada. Kedudukan hukum *paylater* pada *e-commerce* Lazada tidak sesuai kaidah fiqh jika ditinjau dari akad *qard* dan akad *ijarah*.

5. UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur atas rahmat Allah yang telah melimpahkan segala karunia-Nya sehingga atas terselesainya penulisan skripsi ini, penulis hendak mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada keluarga yang telah mendukung selama pendidikan, dan juga seluruh dosen ITB AAS Indonesia yang telah membimbing dan menyalurkan ilmu, serta seluruh teman yang telah mensupport dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

6. REFERENSI

- Al-Asqalani, Al Hafidh Ibnu Hajar. (1999). *Fath Al-Bariy*. Mesir: Dar Ibn Al-Jauzi
- Al-Ghazi, Syekh Al-'Allamah Muhammad bin Qasim. (2003). *Fath al-Qarib al-Mujib*. Lebanon: Darul Kitab al-Islamiyyah
- Dewan Syariah Nasional "Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh" <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/al-qardh> diakses pada 10 Juni 2023
- Djuwaini, Dimyauddin. (2015). *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hidayat, Rahmat. (2020) *Buku Ajar Pengantar Fikih Muamalah*. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BURgerlijk Wetboek), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. (2014). Cet. 41. Jakarta: Balai Pustaka.
- Safira. (2022). "Pengaruh Viral Marketing Online Customer Reviews dan Harga Terhadap Keputusan Pembeli Melalui Marketplace Shopee (Survey Pada Pelanggan Shopee Jakarta Timur)". *Skripsi*. Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.
- Tim Penerjemah Al-Qur'an UUI. (2001). *Al-Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta: UUI Press
- Wardi Muslich, Ahmad. (2017). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.